

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indikator Kinerja Utama (esselon II)					
		1. Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN			
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya
					TOTAL	100	
		2. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	IPK adalah alat untuk menilai proses pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, sekaligus diagnostik dan evaluasi kondisi pembangunan ketenagakerjaan secara komprehensif dan holistik.” “Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar. Indikator Utama tersebut adalah : 1. Perencanaan tenaga kerja 2. Penduduk dan tenaga kerja 3. Kesempatan kerja 4. Pelatihan kerja 5. Produktivitas tenaga kerja 6. Hubungan Industrial	$k_n = \frac{Wu_n}{\sum Ws_n} \times 100$ Dimana : - Koefisien Indikator Utama ke-n - Bobot Indikator Utama ke-n - Bobot Sub Indikator dari Indikator Utama ke-n			

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan																													
			7. Kondisi lingkungan kerja 8. Pengupahan dan kesejahteraan pekerja 9. Jaminan sosial tenaga kerja																														
		Indikator Kinerja Program (esselon III)																															
		1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	IKM = $\frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} \times nilai\ penimbang$ IKM Unit Pelayanan x 25 <table><tr><td>Nilai Persepsi</td><td>Nilai Interval IKM</td><td>Nilai Interval Konversi IKM</td><td>Mutu Pelayanan</td><td>Kinerja Unit Pelayanan</td></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 - 100</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>					Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																													
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																													
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																													
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																													
4	3,26 – 4,00	81,26 - 100	A	Sangat Baik																													
		2. Capaian Produktivitas Tenaga Kerja	Nilai aktual tingkat produktivitas tenaga kerja dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja	$X_{ju} = \frac{\sum PDRB}{\sum PYB} \times 100$ Dengan : X_{ju} : Nilai aktual tingkat produktivitas tenaga kerja dari Provinsi j $\sum PDRB$: Jumlah Produk Domestik Regional Bruto $\sum PYB$: Jumlah Penduduk yang bekerja																													

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		3. Capaian Hubungan Industrial	a. Tingkat Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di Perusahaan Nilai aktual tingkat LKS Bipartit di perusahaan dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan menengah dan besar yang wajib lapor dan memiliki LKS Bipartit dengan total perusahaan menengah dan besar yang wajib lapor. b. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Untuk menghitung tingkat perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan membandingkan total perselisihan hubungan industrial dengan total perusahaan wajib lapor. c. Tingkat Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan Nilai aktual tingkat peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib lapor yang telah memiliki PP dengan total perusahaan wajib lapor. d. Tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan Untuk menghitung tingkat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang didaftarkan adalah dengan membandingkan jumlah perusahaan wajib lapor yang telah memiliki PKB dengan total perusahaan wajib	$X_{63j} = \frac{\sum PWBT}{\sum PW_{MB}} \times 100$ Dengan : X_{63j} : Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang mempunyai lembaga bipartit dari Provinsi j $\sum PWBT$: Jumlah perusahaan wajib lapor yang mempunyai LKS Bipartit $\sum PW_{MB}$: Jumlah perusahaan menengah besar yang wajib lapor $X_{64j} = \frac{\sum PHI}{\sum PW} \times 100$ Dengan : X_{65j} : Nilai aktual tingkat perselisihan hubungan industrial dari Provinsi j $\sum PHI$: Jumlah perselisihan hubungan industrial $\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor $X_{61j} = \frac{\sum PWPP}{\sum PW} \times 100$ Dengan : X_{61j} : Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang mempunyai PP dari Provinsi j $\sum PWPP$: Jumlah perusahaan wajib lapor yang mempunyai PP yang disahkan $\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor $X_{62j} = \frac{\sum PWPKB}{\sum PW} \times 100$ Dengan : X_{62j} : Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang mempunyai PKB dari Provinsi j $\sum PWPKB$: Jumlah perusahaan wajib lapor yang mempunyai PKB $\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
			lapor	
		4. Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Proporsi Besaran Upah Minimum terhadap KHL (Kebutuhan Hidup Layak) Tingkat besaran UMP terhadap KHL dihitung dengan cara membandingkan besaran UMP dengan kebutuhan hidup layak (KHL)	$X_{81j} = \frac{UMP}{KHL} \times 100$ Dengan : X_{81j} : Nilai aktual tingkat besaran UMP dari Provinsi j UMP : Upah minimum Provinsi KHL : Kebutuhan hidup layak
		5. Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	a. Tingkat Pekerja/Buruh yang Menjadi Anggota BPJS Aktif Untuk menghitung tingkat perusahaan yang menjadi peserta jamsostek dilakukan dengan cara membandingkan total perusahaan yang menjadi peserta jamsostek aktif dengan total perusahaan wajib jamsostek. b. Tingkat Perusahaan yang menjadi Anggota BPJS Untuk menghitung tingkat perusahaan yang menjadi peserta jamsostek dilakukan dengan cara membandingkan total perusahaan yang menjadi peserta jamsostek aktif dengan total perusahaan wajib jamsostek	$X_{92j} = \frac{\sum TKJSTK}{\sum TKPW} \times 100$ Dengan : X_{92j} : Nilai aktual tingkat pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek dari Provinsi j $\sum TKJSTK$: Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek aktif $\sum TKPW$: Jumlah pekerja/buruh di perusahaan wajib lapor $X_{91j} = \frac{\sum PWJSTK}{\sum PW} \times 100$ Dengan : X_{91j} : Nilai aktual tingkat perusahaan yang menjadi peserta jamsostek dari Provinsi j $\sum PWJSTK$: Jumlah perusahaan yang menjadi peserta jamsostek aktif $\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib jamsostek

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		c. Capaian Kondisi Kerja Perlindungan Lingkungan	a. Tingkat Kepatuhan Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Provinsi Dihitung dengan membandingkan antara jumlah perusahaan wajib lapor dengan total perusahaan kecil, menengah dan besar b. Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan Dihitung dengan membandingkan jumlah perusahaan yang diaudit penerapan SMK3 dengan total perusahaan wajib lapor c. Tingkat Kecelakaan Kerja Penghitungan tingkatkecelakaan kerja dilakukan dengan membandingkan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan wajib lapor dengan total tenaga kerja di perusahaan wajib lapor	$X_{73j} = \frac{\sum PW}{\sum P_{Kecil-Besar}} \times 100$ Dengan : X_{73j} : Nilai aktual tingkat kepatuhan perusahaan wajib ketenagakerjaan di perusahaan dari Provinsi j $\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor $\sum P_{Kecil-Besar}$: Jumlah perusahaan kecil, menengah dan besar $X_{71j} = \frac{\sum PWSMK3}{\sum PW} \times 100$ Dengan : X_{71j} : Nilai aktual tingkat perusahaan wajib lapor yang menerapkan SMK3 dari Provinsi j $\sum PWSMK3$: Jumlah perusahaan yang diaudit menerapkan SMK3 $\sum PW$: Jumlah perusahaan wajib lapor $X_{72j} = \frac{\sum TKKK}{\sum TKPW} \times 100$ Dengan : X_{72j} : Nilai aktual tingkat kecelakaan kerja pada perusahaan wajib lapor dari Provinsi j $\sum TKKK$: Jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada perusahaan wajib lapor $\sum TKPW$: Jumlah tenaga kerja pada perusahaan wajib lapor
		d. Capaian Kerja Kesempatan	Tingkat Kesempatan Kerja Nilai aktual tingkat kesempatan kerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	$X_{33j} = \frac{\sum PYB}{\sum AK} \times 100$ Dengan : x_{33j} : Nilai aktual tingkat kesempatan kerja dari Provinsi j $\sum PYB$: Jumlah penduduk yang bekerja $\sum AK$: Jumlah angkatan kerja

NO	OPD	IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		e. Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja	a. Tingkat Kapasitas Pelatihan Nilai aktual tingkat kapasitas pelatihan merupakan perbandingan antara daya tampung BLK dengan penganggur terbuka yang berpendidikan SMTP dan SMTA dikalikan dengan perbandingan kabupaten/kota yang memiliki BLK dengan jumlah kabupaten/kota. b. Tingkat Lulusan Pelatihan Tingkat lulusan pelatihan dihitung dengan membandingkan total lulusan peserta pelatihan dengan penganggur terbuka yang berpendidikan SMTP dan SMTA. c. Tingkat Lembaga Latihan Terakreditasi Nilai aktual tingkat lembaga latihan terakreditasi dihitung dengan membandingkan jumlah lembaga latihan (pemerintah dan swasta) yang terakreditasi dengan jumlah keseluruhan lembaga latihan milik pemerintah dan swasta	$X_{41j} = \left(\frac{DTP_{BLK}}{PT_{SMTP-SMTA}} \times \frac{\sum Kab / Kota_{BLK}}{\sum Kab / Kota} \right) \times 100$ Dengan : X_{41j} : Nilai aktual tingkat kapasitas pelatihan dari Provinsi j DTP_{BLK} : Daya tampung lembaga pelatihan BLK $PT_{SMTP-SMTA}$: Penganggur terbuka (SMTP dan SMTA) $\sum Kab / Kota_{BLK}$: Jumlah Kab/Kota yang memiliki BLK $\sum Kab / Kota$: Jumlah Kab/Kota $X_{42j} = \frac{\sum LPP}{\sum PT_{SMTP-SMTA}} \times 100$ Dengan : X_{42j} : Nilai aktual tingkat lulusan pelatihan dari Provinsi j $\sum LPP$: Jumlah Lulusan peserta pelatihan $\sum PT_{SMTP-SMTA}$: Jumlah Penganggur terbuka (SMTP dan SMTA) $X_{43j} = \frac{\sum BLK_{Terakreditasi}}{\sum BLK_{Pemerintah, swasta}} \times 100$ Dengan : X_{43j} : Nilai aktual tingkat lembaga latihan terakreditasi dari Provinsi j $\sum BLK_{Terakreditasi}$: BLK yang telah diakreditasi $\sum BLK_{Pemerintah, swasta}$: BLK milik pemerintah dan swasta